

## DAFTAR PUSTAKA

- Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edited by R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. PT. Balai Pustaka, n.d.
- Cuk Prayitno. “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero.” Universitas Indonesia, 2010.
- Direktorat Jendral Keuangan Negara Kementerian keuangan. Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (2021).
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, and Mataram. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. The Eastern Press Limited, 1953.
- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 023. <https://doi.org/10.31078/jk1912>.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 (2020).
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung jawab](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung_jawab).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Data Covid-19 Di Indonesia,” n.d. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>.
- Kompas. “Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan Di Awal Pandemi Covid-19,” 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19>.
- . “Ruang Isolasi Ventilator Penuh , Angka Kematian Covid-19 Di Bekasi Dikhawatirkan Meningkat,” 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/12/07083881/ruang-isolasi-ventilator-penuh-angka-kematian-covid-19-di-bekasi>.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jendral. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (1998). [https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Menkes RI. “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 230 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Darurat Selama Covid-19.” *Menteri Kesehatan Republik Indonesia* 2019 (2021): 1–46. <https://dokumen.tips/documents/kmk-no-230-th-2010-ttg-rawat-gabung-ibu-bayipdf.html>.
- Nugroho, Hari Pudjo. “Keadilan Proporsional Dalam Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Akibat Kesalahan Tenaga Medis.” Universitas 17 Agustus Surabaya, 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, Pub. L. No. 72 Tahun 2012 (2012).
- . “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” no. 1 (2014). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.
- . UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (2009).
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. “Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Dan Penjelasannya,” 2015, 1–55.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2017.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” 2009.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2014, 4–37.
- . UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen § (1999). <https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/832971>.
- Radar Jogja. “63 Pasien RSUP Sardjito Meninggal,” 2021. <https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2021/07/04/stok-oksigen-menipis-63-pasien-covid-19-meninggal-dunia/>.
- Rusyad, Zahir. *Hukum Perlindungan Pasien*. Malang: Setara Press, 2018.

- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi*. PT Fajar Interpratama, 2017.
- Yustina, Dr. Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. CV. Keni Media, 2012.

